



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam GBHN 1985 telah digariskan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap itu masing-masing bertujuan untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya (Hadi dan Lincoln, 1987).

Indonesia masih merupakan Negara Agraris artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja di sektor pertanian atau produk nasional yang berasal dari pertanian (Mubyarto, 1989).

Kenyataan yang ada, pada tahapan pembangunan tersebut pembangunan ekonomi pertanian merupakan bagian yang di prioritaskan. Kesadaran ini tidak lain karena Indonesia adalah negara agraris yang harus melihat pertanian sebagai potensi dominan. Sebagian besar angkatan kerja diserap di sektor pertanian, yaitu sebanyak 56,6 % dari seluruh angkatan kerja (fadholi, 1991).

Kebijaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia senantiasa didasarkan pada amanat yang telah digariskan dalam GBHN. Dalam pembangunan pertanian

di Indonesia di arahkan untuk memenuhi tujuan yang dicapai yaitu kesejahteraan masyarakat pertanian tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produksi, produktivitas tenaga kerja, tanah dan modal (Soekartawi, 1993).

Dalam menjalankan usaha taninya setiap petani memegang peranan penting antara lain menjadi seorang juru tani yang memelihara tanaman guna mendapatkan hasil yang berfaedah, menjadi pengelola, dan mengambil keputusan dalam penetapan-penetapan alternatif-alternatif yang ada (Mosher, al 1987).

Dibidang pembangunan pertanian usaha yang digarap serius sejak awal Pelita I adalah sektor padi sawah untuk mengejar program swasembada beras sehingga harga beras dapat terjangkau rakyat banyak. Dan aneka ragam program Bimas. Kredit murah yang secara terus-menerus ditawarkan secara luas oleh pemerintah di sertai bibit unggul dan sarana input modern, untuk pertama kalinya dalam sejarah pertanian pangan, peningkatan produksi terjadi terutama karena kenaikan hasil per hektar bukan karena perluasan lahan (Mubyarto, 1985).

Usaha untuk meningkatkan produksi / produktivitas bukanlah usaha yang mudah, karena menyangkut banyak aspek ekonomi (faktor produksi) dan menyangkut pula aspek sosial, budaya, politik dan lain-lain (Gultom, 1990).

Pada hakekatnya tingkat kemakmuran suatu masyarakat tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi unsur: pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan Lain lain. Unsur-unsur kebutuhan utama tersebut bagi kebanyakan penduduk, terutama yang tinggal dipedesaan masih kurang terpenuhi